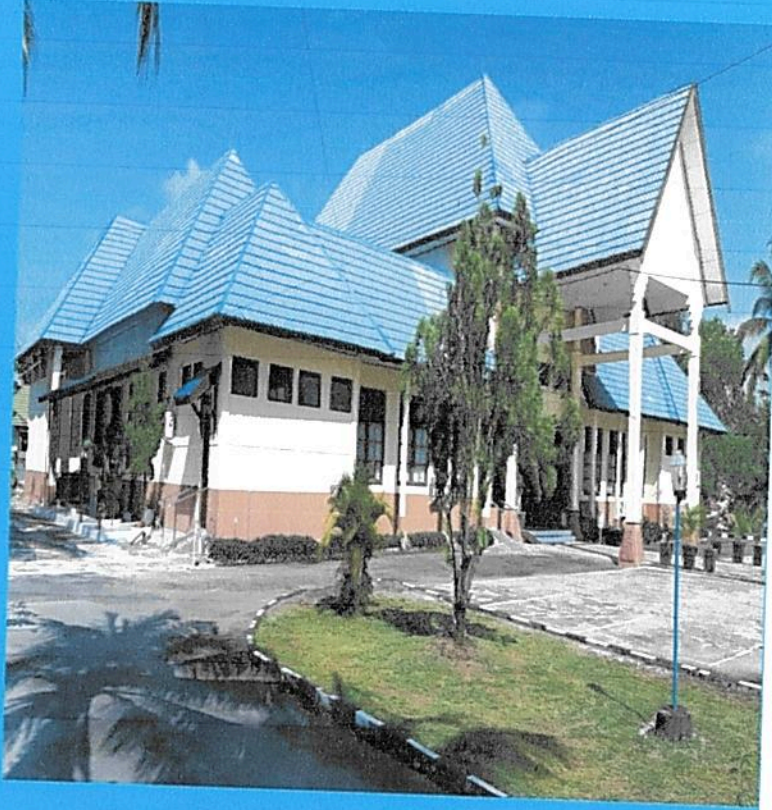




# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA



**2020**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2020**

## PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020. Laporan ini disusun sebagai bentuk implementasi penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama 4 (empat) lingkungan peradilan pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian dapat kami sampaikan dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyumbangkan pikiran serta tenaga dalam penyelesaian laporan ini.

Palangka Raya, 3 Pebruari 2021

PENGADILAN TATA USAHA NEGARAPALANGKA RAYA  
WAKIL KETUA,



**ANDRY ASANI, S.H., M.H.**  
NIP. 19710409 199603 1 001



# DAFTAR ISI

Pengantar

Daftar isi

<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Gambaran Umum Peradilan .....	1
B. Visi dan Misi .....	3
C. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	9
D. Indikator Kinerja Utama .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	12
A. Matrik Indikator Kinerja Utama .....	13
B. Indikator Kinerja Utama .....	16
C. Sasaran Strategis PTUN Palangka Raya Tahun 2020 .....	20
D. Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2020 .....	23
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	25
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	25
B. Realisasi Anggaran .....	41
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	50
A. Kesimpulan .....	50
B. Rekomendasi .....	51

Lampiran

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya resmi berdiri sejak tanggal 29 Oktober 1998 oleh Menteri Kehakiman RI yaitu **Bpk. Prof. Dr. H. MULADI, SH** sampai saat ini, wilayah hukumnya meliputi seluruh Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah yang terdiri 1 Kota dan 13 Kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Barito Selatan dengan Ibu Kota BUNTOK;
2. Kabupaten Barito Timur dengan Ibu Kota TAMIANG LAYANG;
3. Kabupaten Barito Utara dengan Ibu Kota MUARA TEWEH;
4. Kabupaten Gunung Mas dengan Ibu Kota KUALA KURUN;
5. Kabupaten Kapuas dengan Ibu Kota KUALA KAPUAS;
6. Kabupaten Katingan dengan Ibu Kota KASONGAN;
7. Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Ibu Kota PANGKALAN BUN;
8. Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Ibu Kota SAMPIT;
9. Kabupaten Lamandau dengan Ibu Kota NANGA BULIK;
10. Kabupaten Murung Raya dengan Ibu Kota PURUK CAHU;
11. Kabupaten Pulang Pisau dengan Ibu Kota PULANG PISAU;
12. Kabupaten Sukamara dengan Ibu Kota SUKAMARA;
13. Kabupaten Seruyan dengan Ibu Kota KUALA PEMBUANG;
14. Kota PALANGKARAYA

Propinsi Kalimantan Tengah dengan ibukotanya Palangka Raya terletak di bagian Tengah pulau Kalimantan dengan batas-batas: sebelah barat dengan propinsi Kalimantan Barat, sebelah timur dengan Kalimantan Selatan, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan di sebelah utara dengan propinsi Kalimantan Timur.

Propinsi Kalimantan Tengah secara geografis terletak di antara  $0^{\circ} 45''$  Lintang Utara  $3^{\circ} 30''$  Lintang Selatan dan  $111''$  Bujur Timur, dengan luas daratan  $153.564 \text{ km}^2$  atau hanya 8,04 persen dari total luas daratan Indonesia.

Palangkaraya secara geografis terletak di antara  $3^{\circ} 50' \text{ LS} - 1^{\circ} 10' \text{ LU}$   $110^{\circ} 20' - 116^{\circ} 0 \text{ BT}$  dengan luas wilayah totalnya  $157.983 \text{ km}^2$  dengan Jumlah Penduduk sekitar 2.202.599 Jiwa.

Daerah yang paling luas di propinsi Kalteng adalah Kabupaten Murung Raya dengan luas  $23.700 \text{ km}^2$ , kemudian Kabupaten Katingan dengan luas  $17.800 \text{ km}^2$



dan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan luas 16.496 km<sup>2</sup>, sedangkan daerah yang paling sempit adalah Kota Palangka Raya dengan luas 2.399,50 km<sup>2</sup>.

Sebelum tahun 2002 semula terdiri 5 Kabupaten dan 1 Kotamadya dan pada tahun 2002 dimekarkan menjadi 13 kabupaten dan 1 kota, adapun kabupaten yang dimekarkan adalah Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Katingan ;

Daerah aliran sungai yang terdapat di Propinsi Kalimantan Tengah adalah: Sungai Barito yang melintasi 4 kabupaten, Kahayan, Kapuas Kapuas, Sungai Mentaya, sungai Kumai, Sungai Seruyan, Sungai Katingan, Sungai Sabangau, Sungai Rungan, Sungai Busang dan puluhan anak sungai yang tersebar di 14 Kabupaten ;

Bahwa dengan keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya di Propinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat memberikan kontribusi penyelesaian sengketa-sengketa TUN sebagai wujud kepedulian Mahkamah Agung RI dalam memberikan pelayanan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di Kalimantan Tengah.

Sebagai lembaga penyelenggara negara pelaku kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mendeskripsikan capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila di tata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala prioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan.

Perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada.

## **B. VISI DAN MISI**

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah salah satu Pengadilan di Indonesia yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada di Tingkat Pertama di Propinsi Kalimantan Tengah, dan sejalan dengan tugas pokok tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merumuskan Visi atau suatu gambaran keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dimana Visi tersebut relevan dengan rumusan Visi MARI yang disampaikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI pada tanggal 10 September 2009 di Palembang yaitu :

**"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG"**

Dan adapun Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah :

### ***VISI***

*"Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Yang Agung "*

### ***MISI***

- 1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Biaya Ringan, Transparan, dan Modern.*
- 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat.*
- 3. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien.*
- 4. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan tata

pemerintahan yang baik (*good governmance*) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparaturnegara/pemerintah.

Program kerja pembaruan peradilan terlaksana dan terus menuju cita-cita yang diimpikan warga peradilan termasuk independensi organisasi dan keuangan Mahkamah Agung dalam peningkatan sumber daya manusia.

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya harus mempertanggung jawabkan kinerjanya pada masyarakat pencari keadilan. Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah pada umumnya dan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada khususnya.

Mahkamah Agung RI melalui cetak birunya atau Blue Print telah menuangkan berbagai macam usaha perubahan dan perbaikan demi mewujudkan Badan Peradilan yang Agung diseluruh Indonesia secara ideal, dan melalui perubahan dan perbaikan tersebut semua Badan Peradilan diharapkan :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independent, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.



8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi ( IT ) terpadu.

Aspek strategis organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah dengan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan dalam proses mencari keadilan dimana keadilan tersebut merupakan ujung tombak bagi pencari keadilan dalam memperjuangkan haknya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mempunyai beberapa aspek strategi yang harus dijalankan untuk mencapai suatu pengadilan yang berkualitas. Beberapa aspek strategi tersebut adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Keempat aspek tersebut mempunyai pertanggung jawaban yang nilainya dapat dijadikan acuan kedepan yang lebih baik. Kedua sasaran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan Indikator Kinerja Utama yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari rencana strategis kita. Dari rencana strategis yang disusun berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan juga potensi-potensi yang ada.

Pembahasan dan potensi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dapat dikelompokkan menjadi **analisis faktor internal** yang terdiri dari kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta **analisis faktor eksternal** yang terdiri dari peluang (opportunity) dan tantangan yang dihadapi seperti yang telah disinggung sedikit pada maksud dan tujuan adanya Blue Print Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mempunyai 2 analisis yang dapat dijabarkan untuk mencari solusi yang tepat guna penanggulangan permasalahan yang dihadapi yaitu :

## **1. Analisis Faktor Internal**

### **a. Kekuatan (strength)**

Kekuatan-kekuatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya menyangkut hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian. Hal-hal tersebut mencakup :

- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan voorpost (kawal depan) di wilayah propinsi Kalimantan Tengah.
- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya memiliki kekuasaan dan kewenangan mengadili perkara Tata Usaha Negara di tingkat pertama.

### **b. Kelemahan (weakness)**

Kelemahan-kelemahan yang terdapat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dapat dirinci dalam beberapa aspek, sebagai berikut :

#### **➤ Aspek Proses Peradilan**

- Belum maksimalnya mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

#### **➤ Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**

- Pengadilan Tata Usaha Palangka Raya belum mempunyai kewenangan sendiri untuk merekrut pegawai sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

- Kurangnya tenaga administrasi diseluruh bagian baik Kepaniteraan dan bagian Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Palangka Raya.

➤ **Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**

- Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen perpustakaan berbasis teknologi informasi.

➤ **Aspek Sarana dan Prasarana**

- Anggaran yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dari Mahkamah Agung RI belum sesuai dalam arti masih kurang untuk menutupi kebutuhan dan rencana yang diajukan.
- Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang belum sesuai dengan standar prototype Mahkamah Agung RI.

**2. Analisis Faktor Eksternal**

**a. Peluang (Opportunity)**

Peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk melakukan reformasi / perbaikan dapat ditinjau dengan beberapa aspek sebagai berikut :

➤ **Aspek Proses Peradilan**

- Adanya website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

➤ **Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**

- Adanya tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

➤ **Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**



- Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- Dukungan dan koordinasi yang baik antar bagian di dalam lingkup satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
- **Aspek Sarana dan Prasarana**
  - Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berupa internet dan website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

#### **b. Tantangan yang dihadapi (Threats)**

Tantangan-tantangan yang dihadapi di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang akan dihadapi dan dipikirkan jalan keluarnya (solusinya) untuk dapat dilakukan reformasi / perbaikan sebagaimana yang diharapkan adalah sebagai berikut :

- **Aspek Proses Peradilan**
  - Belum adanya kepastian dari hasil tindak lanjut produk keadilan seperti yang diharapkan para pencari keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya seperti halnya di pengadilan negeri.
- **Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**
  - Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya belum seluruhnya dapat menguasai teknologi informasi.
- **Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**
  - Ketersediaan pegawai yang terbatas, jumlah perkara yang terus bertambah diupayakan penyelesaian penanganan perkara terutama permasalahan administrasi perkara gugatan lebih cepat.
  - Terjadinya perubahan sistem administrasi perkara dari sistem administrasi yang dilakukan secara manual menjadi administrasi

secara elektronik salah satunya adalah digunakannya aplikasi E-Court pada PTUN Palangka Raya.

➤ **Aspek Sarana dan Prasarana**

Anggaran yang diberikan Mahkamah Agung RI untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan yang ada.

### **C. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut di atas telah pula menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur.

Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis Pengadilan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan.

Bahwa Sasaran (target) Strategis yang diinginkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah berupa hasil yang akan dicapai secara nyata dari suatu kegiatan (Program) yang telah ditetapkan tersebut yaitu :

1. Peningkatan penyelesaian perkara ;
2. Peningkatan tertib administrasi perkara ;
3. Peningkatan Kualitas SDM ;
4. Peningkatan Kualitas pengawasan ;
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap putusan ;
6. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung ;
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ;
8. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN ;

### **D. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Bahwa kedelapan Sasaran strategis yang diinginkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut diatas sudah dapat digambarkan Indikator Kinerja Utama dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya itu sendiri, dan

dapat pula dibuat suatu perkiraan seberapa besar target yang akan dicapai dengan penjelasan program sebagai berikut ;

1. Peningkatan penyelesaian perkara :  
Jumlah perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya setiap tahun mengalami pasang surut, namun hal itu tidak menjadi persoalan oleh karena seberapa besar pun perkara yang masuk Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, maka institusi ini solid akan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya.  
Dalam peningkatan penyelesaian perkara dalam setiap tahun, maka ada 2 (dua) hal yang menjadi Indikator Kinerja dan target yang akan dicapai yaitu :
  - a. Jumlah perkara yang diterima ;
  - b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan .
2. Peningkatan tertib administrasi perkara  
Indicator bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah melaksanakan tugasnya adalah dengan melihat :
  - a. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis
  - b. Jumlah Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan sidang tepat waktu
  - c. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
  - d. Jumlah penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
  - e. Jumlah penyampaian salinan putusan / salinan penetapan kepada para pihak
  - f. Jumlah eksekusi tepat waktu
3. Peningkatan Kualitas SDM ;  
Sumber daya manusia sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan untuk menjamin adanya peningkatan kualitas pelayanan dan memahami job masing-masing pegawai dengan baik maka diperlukan adanya peningkatan SDM dan sebagai indikatornya adalah :
  - a. Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan Tehnis
  - b. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat non tehnis
4. Peningkatan Kualitas pengawasan ;  
Pengawasan pada prinsipnya bertujuan agar suatu organisasi selalu berjalan dengan baik sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, namun sekalipun ketatnya pengawasan seringkali masih juga dijumpai adanya ketidak puasan atas pelayanan.  
Adapun indicator adanya peningkatan kualitas pengawasan untuk mengukur kinerja utama Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah :



- a. Prosentase Pengaduan yang ditindak lanjuti
  - b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap putusan ;  
Bahwa dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/2010 tentang keterbukaan Informasi pada badan peradilan maka masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari setiap Pengadilan dan sebagai indikator pencapaian peningkatan aksesibilitas tersebut dapat diukur melalui Prosentase perkara yang dapat dipublikasikan.
  6. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung ;  
Untuk melaksanakan tugas pokok Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara perlu adanya daya dukungan manajemen peradilan yang tersedia melalui DIPA.  
Untuk mengetahui DIPA tersebut dialokasikan secara benar dan optimal maka indikator pengukurannya adalah Peningkatan Prosentase Penyerapan anggaran;
  7. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN  
Bahwa dengan adanya DIPA 05, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dipercayakan untuk menyelenggarakan perkara-perkara Prodeo dan sebagai indikator kinerja bahwa DIPA 05 tersebut telah direalisasikan secara dioptimalkan maka dapat dilihat dari jumlah dana yang tersedia untuk perkara Prodeo
  8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ;  
Prosentase penyelenggaraan operasional perkantoran yang berbasis Teknologi Informasi

## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun 2015-2019.

Rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk tahap pertama harus dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan dasar dari berjalannya sebuah roda organisasi yang telah mempunyai tujuan, sasaran strategis dan juga program yang digunakan.

Dari indikator itu pula dapat dibuat sebuah gambaran kearah mana organisasi ini dijalankan. Pada setiap awal tahun , rencana kinerja harus sudah dibuat.

Berdasarkan Keputusan Ketua MA RI Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama, maka rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah sebagai berikut :

No.	Rencana Strategis	Indikator Rencana Strategis
1.	Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Prosentase penurunan sisa perkara d. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu b. Prosentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat misin dan terpinggirkan	a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hokum (posyankum)
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	- Prosentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti

#### **A. MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah menetapkan Matrik Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/369/K/KP.08.08/II/2020 tertanggal Pebruari 2020 dapat dilihat sebagai berikut :

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara : Tingkat Pertama	<p>a. Jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan sesuai dengan SOP yang ditetapkan</p> <p>b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan</p>	<p>Perbandingan antara perkara yang diterima dan jumlah perkara yang diputus</p> <p>Perbandingan antara jumlah perkara Sisa tahun sebelumnya dengan jumlah perkara yang diputus</p>	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2.	Peningkatan Tertib Administrasi Perkara	<p>a. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis</p> <p>b. Jumlah penyampaian fotocopy putusan kepada para pihak tepat waktu (pasal 51 A UU Peratun)</p> <p>c. Jumlah Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu</p> <p>d. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan/Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak</p> <p>e. Jumlah berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap</p> <p>f. Jumlah berkas yang diajukan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap</p>	<p>Perbandingan antara berkas perkara yang diterima dengan berkas perkara yang disidangkan</p> <p>Perbandingan antara berkas perkara yang diputus dengan yang dimintasi</p> <p>Perbandingan antara persidangan dengan pemanggilan</p> <p>Perbandingan antara putusan dan pemberitahuan putusan</p> <p>Perbandingan antara berkas yang diajukan kasasi (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Tingkat Banding dan Mahkamah Agung RI</p>	<p>Panitera</p> <p>Panitera</p> <p>Panitera</p> <p>Panitera</p> <p>Panitera</p> <p>Panitera</p>	<p>Laporan Semester dan Laporan Tahunan.</p> <p>Laporan Bulanan</p> <p>Laporan Bulanan</p> <p>Laporan Bulanan</p> <p>Laporan Bulanan</p> <p>Laporan Bulanan</p> <p>Laporan Bulanan</p>

			Agung RI		
3.	Peningkatan Kualitas Pengawasan	<p>a. Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti</p> <p>b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti</p>	<p>Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan</p> <p>Perbandingan jumlah temuan yang ditindak lanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Pertama dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan</p>	<p>Ketua Pengadilan</p> <p>Ketua Pengadilan</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.</p>
4.	Peningkatan Aksebilitas Masyarakat terhadap peradilan (accses to justice)	Prosentase penyelesaian perkara yang dapat di publikasikan	Perbandingan prosentase putusan perkara yang sudah dapat di download di website (sesuai SK KMA No. 1-144 Th 2011 tentang Keterbukaan Informasi Peradilan) dengan perkara yang diputus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.



## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/369/K/KP.08.08/II/2020 tertanggal Pebruari 2020, Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dapat dilihat sebagai berikut :

LAMPIRAN : 1  
Keputusan Ketua PTUN Palangka Raya  
Nomor : W2-TUN6/  
/K/KP.08.08/II/2020  
Tanggal : Pebruari 2020

1. Nama Departemen/Lembaga : MAHKAMAH AGUNG R.I
2. Satuan Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
3. Nama Sub. Organisasi Organisasi Palangka Raya : Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
4. Tugas : Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman dengan memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial kepada aparatur peradilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan pengadilan
5. Fungsi :
  - a. Menerima dan Memproses administrasi pendaftaran perkara
  - b. Menyiapkan dan Mengatur rencana persidangan perkara
  - c. Menyelenggarakan Administrasi Persidangan
  - d. Mendokumentasikan berkas perkara dan pengarsipan
  - e. Menyampaikan putusan pengadilan kepada pihak-pihak
  - f. Menerbitkan dokumen putusan pengadilan.

**MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan	Perbandingan Jumlah Sisa Perkara Yang diselesaikan dengan Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan = 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan Jumlah Perkara yang diselesaikan Tahun berjalan dengan Jumlah Perkara yang ada = 80%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	Perbandingan Jumlah Sisa Perkara Tahun Berjalan – Jumlah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya dengan jumlah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya = 10%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, Kasasi dan PK	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding = 45%</li> <li>• Kasasi = 23%</li> <li>• Peninjauan Kembali = 95%</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Pengadilan	Berdasarkan Survey Kepuasan Layanan Publik = 75%	Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	Perbandingan Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan Jumlah Putusan = 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan lengkap dan tepat waktu	Perbandingan Jumlah Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dengan Jumlah Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK = 100%	Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan

		c. Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	Jumlah Putusan perkara sengketa pilkada yang diupload diwebsites dengan Jumlah Perkara sengketa pilkada yang diputus = 0%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Perbandingan Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan dengan Jumlah Perkara Prodeo = 0%	Dirjen Badilmiltun dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	Perbandingan Jumlah Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu = 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	Perbandingan Jumlah Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti Dengan Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT = 75%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

LAMPIRAN : 2  
Keputusan Ketua PTUN Palangka Raya  
Nomor : W2-TUN6/  
/K/KP.08.08/III/2019  
Tanggal : Maret 2019

1. Nama Departemen/Lembaga : MAHKAMAH AGUNG R.I
2. Satuan Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
3. Nama Sub. Organisasi Organisasi Palangka Raya : Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara
4. Tugas : Menyelenggarakan Koordinasi dan Pembinaan Dukungan Teknis Administrasi Organisasi dan Financial kepada seluruh unsur dilingkungan Pengadilan
5. Fungsi :
  - a. Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan serta Pembinaan Administrasi Kesekretariatan
  - b. Pembinaan dan Pelaksanaan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Umum dan Keuangan serta Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.
  - c. Perlengkapan dan Ketatausahaan Administrasi Pengadilan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya Manajemen Pelayanan di PTUN Palangka Raya	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase Tata Kelola dan Tata Adminstrasi di Kesekretariatan</li> <li>b. Persentase Pegawai yang Lulus mengikuti diklat dan pelatihan teknis dan non teknis</li> <li>c. Persentase Penyerapan Anggaran Pemeliharaan dan Operasional Perkantoran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase Tata Kelola dan Tata Adminstrasi di Kesekretariatan = 100%</li> <li>b. Persentase Pegawai yang Lulus mengikuti diklat dan pelatihan teknis dan non teknis = 100%</li> <li>c. Persentase Penyerapan Anggaran Pemeliharaan dan Operasional Perkantoran = 95%</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris</li> <li>2. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana</li> <li>3. Kasubbag Umum dan Keuangan</li> </ol>	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan Prasarana	Prosentase Penyerapan Anggaran Pengadaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana.	Prosentase Penyerapan Anggaran Pengadaan Kebutuhan Sarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris</li> <li>2. Kasubbag Umum dan Keuangan</li> </ol>	Laporan Bulanan dan Laporan

sesuai standar pelayanan peradilan yang prima		dan Prasarana = 100%		Tahunan
---	--	----------------------	--	---------

### C. SASARAN STRATEGIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama maka Sasaran Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2020 adalah Sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Prosentase penurunan sisa perkara d. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali e. Indeks esponden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100% 80% 10% 45 % 23 % 95 % 75 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Prosentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu c. Prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100% 100% 100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posyankum)	0% 0%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan peradilan	➤ Prosentase putusan perkara TUN yang ditindak lanjuti	75%



Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut serta dalam rangka mewujudkan visi pengadilan yaitu “ **Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Yang Agung**”, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

**1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel :**

Jumlah perkara setiap tahun mengalami peningkatan, namun hal itu tidak menjadi persoalan oleh karena seberapa besarpun perkara yang masuk maka institusi ini solid akan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya.

Dalam peningkatan penyelesaian perkara dalam setiap tahun, maka ada 4 (empat) hal yang menjadi Indikator Kinerja dan target yang akan dicapai yaitu :

- a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan.
- b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- c. Prosentase penurunan sisa perkara
- d. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
  - Banding
  - Kasasi
  - Peninjauan kembali
- e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

**2. Terwujudnya peradilan yang efektif dan efisien.**

Indikator kinerja bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah melaksanakan tugasnya dengan melihat :

- a. Prosentase salinan putusan yang diterima para pihak tepat waktu.
- b. Prosentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu.
- c. Prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus melalui Aplikasi SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

**3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sesuai dengan perintah lembaga tinggi negara yaitu Mahkamah Agung telah melaksanakan pemberian akses bagi warga yang tidak mampu. Indikator kinerja dari sasaran strategis ke tiga ini adalah :

- a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan
  - b. Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posyankum).
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan peradilan

Dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- Prosentase putusan perkara TUN yang ditindak lanjuti

Untuk sasaran strategis kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah menyiapkan sasaran yang harus dilaksanakan dan dicapai yaitu :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya manajemen pelayanan di PTUN Palangka Raya	a. Jumlah dokumen tata kelola dan tata administrasi b. Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan dan pelatihan c. Penyelenggaraan operasional perkantoran	100% 100% 95 %
2.	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasaana sesuai standar pelayanan yang prima	➤ Prosenase jumlah sarana dan prasarana yang ada sesuai standar mutu	95 %

**D. RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TAHUN 2020**

Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berdasarkan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• Peninjauan Kembali</li> </ul>	45 % 23 % 95 %
		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	75 %
2.	<b>Peningkatan Efectivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan lengkap dan tepat waktu	100 %
		c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	0
3.	<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat</b>	a. Persentase perkara prodeo yang	0

	miskin dan terpinggirkan	diselesaikan	
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	75 %
5.	Meningkatnya Manajemen Pelayanan di PTUN Palangka Raya	a. Persentase tata kelola dan tata administrasi di Kesekretariatan	100 %
		b. Persentase pegawai yang lulus mengikuti diklat dan pelatihan teknis dan non teknis	100%
		c. Persentase penyerapan anggaran pemeliharaan dan operasional perkantoran	95 %
6.	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Peradilan Yang Prima	Persentase penyerapan anggaran pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana	100 %

## **BAB III.**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Secara umum pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

#### **1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020**

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk presentase, indeks, rata-rata , angka dan jumlah. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa



semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Penghitungan presentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sbb:

- (1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Persentase Pencapaian}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Memperhatikan Tupoksi, maka dalam menghitung pengukuran kinerja rumus yang digunakan adalah rumus (1) seperti tersebut diatas. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisi kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategi serta sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dan indicator sasaran.

Capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2020 dari masing-masing indikator yang sudah ditetapkan berikut analisisnya akan dibahas berikut ini.

**Tabel**  
**Pengukuran Capaian Kinerja PTUN Palangka Raya Tahun 2020**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80 %	91,67 %	114,59%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10 %	71,42 %	714,2 %
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding	45 %	6,67 %	14,82 %
		Kasasi	23 %	11,11 %	48,30 %
Peninjauan Kembali	95 %	96,67 %	101,76 %		
e. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	75 %	73,3 %	97,73 %		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100 %	100 %
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan Tepat Waktu	100%	100 %	100 %
		c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat ( sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	0	0	0
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0	0	0
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100 %	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75 %		

## **2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2020, 2019 dan 2018**

Perkembangan realisasi kinerja dan capaian kinerja yang terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mengalami kemajuan atau perkembangan menuju yang lebih baik. Perkembangan realisasi kinerja dan capaian kinerja dapat kita lihat dari perbandingan antara tahun 2018, 2019 dan 2020.

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2020**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80 %	91,67 %	114,59%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10 %	71,42 % Naik	714,2 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	45 % 23 % 95 %	6,67 % 11,11 % 96,67 %	14,82 % 48,30 % 101,76%
		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75 %	73,3 %	97,73 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0%	0%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posyankum)	100%	0%	0%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara tata usaha negara yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	75%	0 %	0 %

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2019**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	60 %	68,1%	68,1%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	1,5 %	-133,33% Naik	100%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	50 % 25 % 95 %	46,67 % 50 % 96,67 %	46,67 % 50 % 96,67 %
		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95 %	79 %	79 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0%	0%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posyankum)	100%	0%	0%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkaramtata usaha negara yang ditindak lanjuti	89 %	79,17 %	79,17 %



**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2018**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	60 %	86,36 %	72,5%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	1,5 %	60 % Turun	0%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	50 % 25 % 95 %	50 % 21,05 % 97,37 %	50 % 21,05 % 97,37 %
		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95 %	0	0
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0%	0%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posyankum)	100%	0%	0%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkaramtata usaha negara yang ditindak lanjuti	89 %	86,84 %	86,84 %

## 1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018, 2019 dan 2020 dengan Target Kinerja Jangka Menengah 2020-2024

Pengukuran realisasi kinerja dilihat beberapa tahun terakhir sampai dengan tahun ini mendekati target dan ada beberapa bagian yang sudah memenuhi target, Ini menunjukkan bahwa pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan.. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan perencanaan strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah seimbang.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018, 2019 dan 2020 dengan target kinerja jangka menengah tahun 2020-2024 dalam RENSTRA PTUN Palangka Raya adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	60 %	60 %	80 %	86,36 %	68,1%	91,67%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	1,5 %	1,5 %	10 %	60 % Turun	-133,33% Naik	71,42% Naik
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :						
		- Banding	50 %	50 %	45 %	50 %	46,67 %	6,67 %
		- Kasasi	25 %	25 %	23 %	21,05 %	50 %	11,11%
	- Peninjauan Kembali	95 %	95 %	95 %	97,37 %	96,67 %	96,67%	
	e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95 %	95 %	75 %	0	79 %	100 %	
2	Peningkatan	a. Persentase salinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p> <p>b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	0	0	0	0
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posyankum)	100%	100%	100%	0	0	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	- Persentase putusan perkaramtata usaha negara yang ditindak lanjuti	89 %	0 %	0 %	86,84 %	79,17 %	0

## **1. Analisis Akuntabilitas Kinerja**

### **4.1. Analisis keberhasilan kinerja**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Tingkat capaian kinerja/ keberhasilan kinerja yang mencapai tingkat capaian yang baik adalah pada tugas pokok, wewenang dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yaitu mengadili perkara yang menjadi kewenangan di tingkat pertama.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya menilai keberhasilan kinerja itu dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah dapat mencapai keberhasilan yang ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan tahun 2020-2024.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah melakukan analisis dan evaluasi atas hasil capaian kinerja tahun 2020, sehingga mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada rencana strategis kinerja tahun 2020-2024.

#### **➤ Analisis Capaian Akuntabilitas Kinerja Perkara**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya menggunakan indikator kinerja utama untuk mengukur kinerja penanganan perkara. Pertama, rasio penyelesaian perkara (clearance rate) yaitu perbandingan jumlah perkara masuk dan putus.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sudah dikatakan berkinerja baik dengan nilai rasio penyelesaian perkaranya minimal 80%. Penetapan target minimal clearance rate 80% ini karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya masih memiliki tunggakan perkara. Tunggakan perkara tersebut dapat diselesaikan semua sesuai waktu dan menangani perkara

yang masuk sesuai aturan yang telah ditetapkan dan berusaha untuk meminimalkan tunggakan menjadi lebih rendah.

**a. Perkara Gugatan**

Perkara gugatan yang tersisa di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dari Tahun 2018, 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut :

TAHUN	SISA TAHUN LALU	MASUK	PUTUS	CABUT	SISA AKHIR
2018	15	29	31	7	6
2019	6	38	24	6	14
2020	14	34	34	10	4

**b. Perkara Banding**

Perkara Banding yang tersisa di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dari Tahun 2018, 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut :

TAHUN	MASUK	PUTUS	CABUT
2018	19	23	0
2019	16	14	0
2020	24	19	0

**c. Perkara Kasasi**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai pengadilan tingkat pertama selama tahun 2018, 2019 dan 2020 telah menerima permohonan kasasi dengan perincian sebagai berikut :

TAHUN	MASUK	PUTUS	CABUT
2018	15	11	-
2019	8	8	-
2020	17	5	0

**d. Perkara peninjauan Kembali (PK)**

Keadaan perkara Peninjauan Kembali di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya selama tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

TAHUN	MASUK	PUTUS	CABUT
2018	6	-	-
2019	1	-	-
2020	2	1	0



**e. Perkara yang dimohonkan eksekusi**

Jumlah perkara gugatan yang dimohonkan eksekusi oleh pihak selama tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

TAHUN	MASUK	PUTUS	CABUT
2018	5	-	-
2019	5	-	-
2020	1	-	-

**f. Keuangan Perkara**

Keadaan keuangan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka raya selama periode Januari s.d Desember 2019 sebagai berikut :

- Saldo Awal : Rp. 25.595.650,-
- Penerimaan : Rp. 153.723.700,- +
- Jumlah : Rp. 179.319.350,-
- Pengeluaran : RP. 153.449.500,- -
- Saldo : RP. **25.869.850,-**

**g. Penanganan Pengaduan**

Penanganan pengaduan yang diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2020 adalah tidak ada pengaduan yang diterima. Sesuai dengan pedoman Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

NO.	PENGADUAN	JUMLAH SURAT
1	Pengaduan yang masuk	: Nihil
2	Pengaduan yang sudah diselesaikan	: Nihil
3	Pengaduan yang masih diproses	: Nihil
4	Pengaduan yang diteruskan ke Bawas MARI	: Nihil
5	Pengaduan yang tidak layak ditindak lanjuti	: Nihil

## 4.2. Analisis Kegagalan

Ada beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan dengan baik atau belum mencapai prosentase maksimal yaitu salah satunya kegiatan penurunan sisa perkara yang ada di Pengadilan tata Usaha Negara Palangka Raya dimana belum mencapai hasil yang memuaskan yaitu penurunan sisa perkara yang diharapkan setiap tahun turun meskipun hanya 0,001%. Penurunan sisa perkara setiap tahun tidak dapat dipenuhi sesuai target. Karena perkara yang masuk setiap tahunnya juga berubah dan perkara yang dihadapi kualitasnya berbeda, Ada yang butuh waktu yang cukup untuk penyelesaiannya.

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan juga menjadi sorotan yang utama dikarenakan putusan akhir pengadilan belum semua dijalankan eksekusinya oleh pihak tergugat. Ini yang menjadikan masalah, tidak adanya sanksi bagi pihak Tergugat yang belum melaksanakan eksekusi apalagi tidak melaksanakan eksekusi, ini membuktikan bahwa putusan pengadilan belum diterima oleh Tergugat dalam hal ini pihak pemerintah, Karena jika menjalankan putusan pengadilan dengan mengabaikan eksekusinya membuat nilai kerja pihak pemerintah buruk di mata masyarakat. Dua hal inilah yang menjadi ada sedikit kegagalan dalam menjalankan kinerja untuk memenuhi target yang sudah ditentukan dalam sasaran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

### ➤ Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Faktor-faktor sumber daya yang memiliki andil dan menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja antara lain :

1. Terbatasnya kuantitas sumber daya manusia yang ada sehingga menyulitkan penempatan pegawai yang proporsional.
2. Sulitnya minta tambahan formasi pegawai dimana jumlah pegawai yang ada terutama staf tidak dapat mencukupi dibanding dengan pekerjaan yang ada.

3. Penempatan formasi pegawai baru ditetapkan oleh pusat, tidak memenuhi aspirasi akan permohonan penambahan formasi pegawai.
4. Kurangnya kualitas sumber daya manusia.

Dengan tenaga yang minim berusaha untuk bisa melakukan semua pekerjaan itu dengan baik. Dengan pendekatan yang baik yang dilakukan pimpinan kantor semua dapat diatasi tanpa beban. Tugas pokok dan fungsi yang ada telah mendapat keberhasilan dengan ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target dan sasaran strategis yang telah ditetapkan tahun 2020 maupun sasaran strategis jangka menengah.

Dalam menjawab berbagai permasalahan tentang sumber daya tersebut, maka dibutuhkan suatu langkah-langkah antara lain :

1. Penempatan formasi pegawai baru harus memperhatikan peta kekuatan pegawai pada masing-masing satuan kerja.
2. Dalam menempatkan pegawai sedapat mungkin mempertimbangkan aspirasi satuan kerja di daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkala dengan memperbanyak kegiatan bimbingan teknis dan workshop dengan sistem memperbanyak simulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
4. Mengusulkan penambahan pegawai dan menerima pegawai melalui jalur mutasi.
5. Mengusulkan peningkatan anggaran belanja pada DIPA pada tahun anggaran 2020 khususnya yang berkenaan dengan pemenuhan sarana dan prasarana kerja Peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk realisasi anggarannya, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah mengajukan anggaran DIPA yang telah diatur sebaik mungkin untuk keperluan kantor. Pengajuan ini sesuai dengan rencana strategis dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Terpenuhinya sasaran strategis yang ada indikator kinerja utama membawa dampak positif bagi pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

Anggaran yang diajukan juga dipergunakan di bagian kepaniteraan perkara maupun hukum untuk kemajuan pelayanan terhadap masyarakat terutama para pencari keadilan.

➤ **Analisis Program / Kegiatan Penunjang Keberhasilan Capaian Kinerja**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah mempunyai rencana program atau kegiatan yang harus dilaksanakan untuk kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2020 dan untuk jangka menengah tahun 2020-2024.

Program atau kegiatan ini sangat menunjang sekali untuk keberhasilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ke masa yang akan datang. Program-program ini diantaranya yang sangat diperlukan yaitu :

1. program penyelesaian perkara,
2. peningkatan tertib administrasi dan
3. Tertib dokumen tata kelola
4. Kualitas sumber daya manusia.
5. Operasional perkantoran
6. Jumlah sarana dan prasarana.

Penyelesaian perkara ini ditujukan untuk para pencari keadilan agar merasa dilayani dengan baik dan merasa puas, Pelayanan penyelesaian perkara ini harus didukung adanya kualitas sumber daya manusia yang memenuhi syarat kejujuran, kepintaran. Kualitas sumber daya manusia

sangat diperlukan untuk tertib administrasi perkara. Kualitas sumber daya manusia yang baik dan layak dapat menunjang keberhasilan suatu unit kerja.

Keenam kegiatan yang ada dalam program tersebut pelaksanaannya harus diawasi oleh instansi yang lebih tinggi agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan tetap dijalurnya.

Kesemua program itu harus mendapat dukungan agar berjalan dengan baik, terutama dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis baik dari Mahkamah Agung RI ataupun dari Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Pemenuhan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk peningkatan / keberhasilan program yang dibuat dan dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Pencapaian perjanjian kinerja itu telah tercantum dalam program / kegiatan yang ada dan menunjang keberhasilan peradilan terutama di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun Anggaran 2020 mengacu kepada Undang-Undang RI, Peraturan Presiden RI dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 seperti :

1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
5. Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

6. Peraturan Presiden RI No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
7. DIPA BUA Tahun Anggaran 2020 No. DIPA-005.01.2.578843/2020 Tanggal 12 Nopember 2019 dan DIPA Dirjenmiltun Tahun Anggaran 2020 No. DIPA-005.05.2.578844/2020 Tanggal 12 Nopember 2019;
8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No : 65/PA/SK/XII/2019 Tanggal 02 Desember 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui DIPA Tahun 2020 No. DIPA-005.01.2.578843/2020 dan No. DIPA-005.05.2.578844/2020 Tanggal 12 Desember 2020 mempunyai 3 (Tiga) Program untuk kelancaran dalam fungsi dan sub fungsi kegiatan seperti :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (005.01.01).

Dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung terdapat kegiatan :

❖ Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066) dengan keluaran :

▪ Layanan Perkantoran (1066.994) dengan sub keluaran :

– Gaji dan Tunjangan (1066.994.001)

– Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (1066.994.002)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (005.01.02).

Dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung terdapat kegiatan :

❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (1071) dengan keluaran :



- Layanan Sarana dan Prasarana Internal (1071.951) dengan sub keluaran:
    - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (1071.951.052)
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (005.05.09).

Dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara terdapat kegiatan :

- ❖ Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (1059) dengan keluaran :
  - Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu (1059.001) dengan sub keluaran :
    - Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pradilan TUN (1059.001.051).
  - Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara (1059.002) dengan sub keluaran :
    - Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Prodeo (1059.002.051)
  - Pos Bantuan Hukum (1059.003) dengan sub keluaran :
    - Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (1059.003.051)

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui **DIPA BUA Tahun 2020 No. DIPA-005.01.2.578843/2020 Tanggal 12 Desember 2018** dengan nilai pagu awal Rp. 4.026.797.000,- mengalami revisi DIPA sebanyak 8 kali, Sedangkan untuk **DIPA Dirjenmiltun No. DIPA-005.05.2.578844/2020 Tanggal 12 Nopember 2019** dengan nilai pagu Rp. 38.300.000,- mengalami revisi anggaran sebanyak 1 kali.

Adapun perincian dari DIPA BUA No. DIPA-005.01.2.578843/2020 tanggal 12 Nopember 2019 sampai pada Revisi ke-8 dan DIPA Dirjen Badilmiltun No. DIPA-005.05.2.578844/2019 tanggal 12 Nopember 2019 menurut Program, Kegiatan dan Keluaran adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (005.01.01) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 4.617.897.000.

Dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung terdapat kegiatan :

- ❖ Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066) dengan keluaran :

- Layanan Perkantoran (1066.994) dengan sub keluaran :

- Gaji dan Tunjangan (1066.994.001) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 3.408.253.000,-.
- Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (1066.994.002) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 1.184.644.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (005.01.02) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 25.000.000,-.

Dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung terdapat kegiatan :

- ❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (1071) dengan keluaran :

- Layanan Sarana dan Prasarana Internal (1071.951) dengan sub keluaran:

- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (1071.951.052) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 25.000.000,-.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (005.05.09) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 38.300.000,-.

Dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara terdapat kegiatan :

- ❖ Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (1059) dengan keluaran :

- Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu (1059.001) dengan sub keluaran :
  - Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pradilan TUN (1059.001.051) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 3.500.000,-.
- Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara (1059.002) dengan sub keluaran :
  - Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Prodeo (1059.002.051) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 3.000.000,-.
- Pos Bantuan Hukum (1059.003) dengan sub keluaran :
  - Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (1059.003.051) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 31.800.000,-.

Dalam mengelola keuangan negara, pembelanjaan dapat dibedakan menjadi 3 yaitu :

1. Belanja Pegawai = Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan Belanja Pegawai seperti Gaji Pegawai, Tunjangan istri/suami, Tunjangan anak, Tunjangan Jabatan (Struktural/ Fungsional), Tunjangan Umum dan Tunjangan lainnya.
2. Belanja Barang = Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan Belanja setiap bulannya untuk keperluan sehari – hari kantor seperti Belanja Keperluan Perkantoran (ATK, internet, Satpam, Sopir dan Pesuruh), Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Daya dan Jasa, Belanja Pemeliharaan Aset Bergerak dan Belanja lainnya.
3. Belanja Modal = Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan Belanja Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung, Belanja Pengadaan Meubelair, Belanja Pengadaan Alat Pengolah Data, Belanja Pengadaan Peralatan Kantor (Inventaris Kantor).

Untuk Satuan Kerja Pengadailan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam mengelola keuangan negara melalui 2 DIPA Tahun 2020 No. DIPA-005.01.2.578843/2020 dan No. DIPA-005.05.2.578844/2020 Tanggal 12 Desember 2018 dapat dilihat sebagaimana berikut ini :

#### **D.1. Belanja Pegawai**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan jumlah sampai saat ini 21 Pegawai dan Hakim telah lakukan penganggaran untuk gaji, honorarium dan tunjangan dalam DIPA No. DIPA-005.01.2.578843/2020 revisi ke 8 Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.408.253.000,-. Dalam pelaksanaan DIPA selama Tahun Anggaran 2019 telah menyerap dana sebesar **Rp. 3.381.764.442,-** dan Pengembalian sebesar Rp. 925.000,- sehingga terjadi realisasi dibawah anggaran sebesar Rp. 27.413.558,- atau sebesar **99,22%** dari pagu DIPA yang ada.

#### **D.2. Belanja Barang**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya memerlukan barang habis pakai untuk memperlancar tugas pokok dan fungsinya telah lakukan pengusulan untuk belanja barang dalam DIPA BUA No. DIPA-005.01.2.578843/2020 Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.184.644.000,-. Dalam pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya selama Tahun Anggaran 2020 telah menyerap dana DIPA BUA sebesar **Rp. 1.182.528.698,-** dan Pengembalian sebesar Rp. 0,- sehingga terjadi realisasi dibawah anggaran sebesar Rp. 2.115.302,- atau sebesar **98,82%** dari pagu DIPA BUA. Hal ini terjadi karena disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan sehingga mempengaruhi jumlah penyerapan pagu DIPA yang disediakan. Adapun Penyerapan belanja barang tersebut terdiri :

- Belanja Barang Operasional (5211) terserap sebesar Rp. 625.998.468,- atau 99,91% yang terdiri dari belanja :

- Belanja Keperluan Perkantoran terserap sebesar Rp. 534.591.468,- atau 99,94% dari pagu DIPA.
- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat terserap sebesar Rp. 5.986.000,- atau 99,77% dari pagu DIPA.
- Belanja Honor Operasional Satker sebesar Rp. 40.680.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
- Belanja Barang Operasional Lainnya sebesar Rp. 29.027.000,- atau 99,28% dari pagu DIPA.
- Belanja Barang Penangan Pandemi Covid-19 sebesar Rp. 15.714.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA
- Belanja Barang Persediaan (5218) terserap sebesar Rp. 62.065.000,- atau 100,00% terdiri dari belanja :
  - Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi terserap sebesar Rp. 62.065.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
- Belanja Jasa (5221) terserap sebesar Rp. 92.134.802,- atau 99,41% terdiri dari belanja :
  - Belanja Langganan Listrik terserap sebesar Rp. 68.341.513,- atau 99,78% dari pagu DIPA.
  - Belanja Langganan Telepon terserap sebesar Rp. 593.289,- atau 59,57% dari pagu DIPA.
  - Belanja Sewa Rumah Hakim sebesar Rp. 21.600.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
  - Belanja Jasa Lainnya Sebesar Rp. 1.600.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
- Belanja Pemeliharaan (5231) terserap sebesar Rp. 378.134.000,- atau 100,00% terdiri dari belanja :
  - Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan terserap sebesar Rp. 194.388.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.

- Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya terserap sebesar Rp. 42.892.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
- Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terserap sebesar Rp. 140.854.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
- Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241) terserap sebesar Rp. 24.196.428,- atau 100,00% dari pagu DIPA.

Sedangkan DIPA Dirjen Badilmiltun No. DIPA-005.05.2.578844/2020 Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 38.300.000,-, realisasi anggaran **Rp. 31.800.000,-** atau **83,03%** dari pagu DIPA. hal ini disebabkan karena Belanja Pengamanan Sidang tidak ada digunakan dan Belanja penanganan perkara prodeo tidak ada digunakan karena tidak perkara prodeo yang masuk sehingga dana yang ada tidak dapat digunakan.

### **D.3. Belanja Modal**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk memperlancar tugas pokok dan fungsinya telah lakukan pengusulan sarana dan prasarana untuk belanja modal untuk menunjang tugas-tugas pokok dan fungsi dalam DIPA BUA No. DIPA-005.01.2.578843/2020 Tahun Anggaran 2020 terdapat anggaran belanja modal dengan realisasi **Rp. 25.000.000,-** atau **100,00%** dari pagu DIPA.



**DAFTAR REALISASI ANGGARAN 2 DIPA TAHUN 2020 PER 30 DESEMBER  
2020  
(dalam Rupiah)**

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi diatas/(dibawah) Anggaran	% Realisasi Anggaran
1.	Bel. Pegawai (01)	3.408.253.000,-	3.381.764.442,-	(26.488.558,-)	99,22
2.	Bel. Barang (01)	1.184.644.000,-	1.182.528.698,-	(2.115.302,-)	99,82
	Bel. Barang (05)	38.300.000,-	31.800.000,-	(6.500.000,-)	83,03
3.	Bel. Modal (01)	25.000.000,-	25.000.000,-	0,-	100,00
	Jumlah Belanja	4.656.197.000,-	4.621.093.140,-	(35.103.860,-)	99,25

**DAFTAR REALISASI PNBP 2 DIPA PER 30 DESEMBER TAHUN 2020  
(dalam Rupiah)**

No.	Uraian	Target	Realisasi	Realisasi diatas/(dibawah) Anggaran	% Realisasi Anggaran
1.	DIPA 01	17.107.000,-	16.101.243,-	(1.005.757,-)	94,12
2.	DIPA 05	6.696.000,-	15.166.500,-	8.470.500,-	226,50
	Jumlah	23.803.000,-	31.267.743,-	7.464.743,-	131,36

# BAB IV

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN :

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah salah satu Pengadilan di Indonesia yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada di Tingkat Pertama di Propinsi Kalimantan Tengah, dan sejalan dengan tugas pokok tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merumuskan Visi atau suatu gambaran keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dimana Visi tersebut relevan dengan rumusan Visi MARI yang disampaikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI pada tanggal 10 September 2009 di Palembang yaitu : "TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG"

Dan adapun Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah :

**" TERWUJUDNYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA YANG AGUNG "**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut di atas telah pula menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur.

Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik Pengadilan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan.

Bahwa Sasaran (target) Strategis yang diinginkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah berupa hasil yang akan dicapai secara nyata dari suatu kegiatan (Program) yang telah ditetapkan tersebut yaitu :

1. Peningkatan penyelesaian perkara ;
2. Peningkatan tertib administrasi perkara ;
3. Peningkatan Kualitas SDM ;
4. Peningkatan Kualitas pengawasan ;
5. Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap putusan ;
6. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung ;

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ;
8. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN ;

## **B. REKOMENDASI :**

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**  
**LAPORAN TAHUNAN**  
**JANUARI S.D DESEMBER 2020**

NO	JENIS PERKARA	SISA TAHUN LALU	MASUK	DISMISSAL	PERLA WANAN	CABUT	PUTUS	SISA	PERMOHONAN.				KET
									BANDING	KASASI	PK	EKSEKUSI	
1	PERTANAHAN	5	9	-	-	5	8	1	10	5	-	-	
2	KEPEGAWAIAN	1	3	-	-	-	3	1	3	5	-	-	
3	PERIZINAN	1	3	-	-	-	4	-	4	1	-	1	
4	LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	TENDER/PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	BADAN HUKUM/PARPOL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	7	12	-	-	6	13	-	7	5	-	-	
8	KEPALA DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	PROSES PEMILIHAN UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	PENGGANTIAN ANTAR WAKTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	KETENAGAKERJAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	K I P	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
13	PENGADAAN TANAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	FIKTIF POSITIF	-	3	-	-	2	1	-	-	-	1	-	
15	PENYALAHGUNAAN WEWENANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	TINDAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	MEREK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	LAIN LAIN	-	3	-	-	1	-	2	-	-	1	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>14</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	

# KEADAAN PERKARA TAHUN 2020

A. SISA PERKARA THN 2019 : 14 PERKARA

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL MASUK	PENGGUGAT PEMOHON	TERGUGAT TERMOHON
01	22/G/2019/PTUN.PLK (PERIJINAN)	05-09-2019	PT. GAUNG ALAM SEMESTA	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN KATINGAN
02	24/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	11-09-2019	NOORYANIE DARHAMSyah	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
03	26/G/2019/PTUN.PLK (DESA/LAIN-LAIN)	13-11-2019	TATI, S.Pd	1. BUPATI KAPUAS; 2. KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA HURUNG TAMPIN, KECAMATAN PASAK TALA, KABUPATEN KAPUAS
04	27/G/2019/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	21-11-2019	Drs. DAGUT, SH.,MT	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
05	28/G/2019/PTUN.PLK (DESA)	22-11-2019	H. MAHLIANI	1. BUPATI BARITO SELATAN; 2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KALANIS, KECAMATAN DUSUN HILIR, KABUPATEN BARITO SELATAN
06	29/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	17-12-2019	ERDI	KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
07	30/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	18-12-2019	PT. HARAPAN HIBRIDA KALBAR	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
08	31/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	19-12-2019	ARMAN MUIS	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
09	32/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	20-12-2019	1. ERWIN BARUS; 2. SULAEMAN; 3. KENJI JOSH FRINCEN LEE; 4. HORMAN	KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
10	33/G/2019/PTUN.PLK (DESA / LAIN-LAIN)	23-12-2019	NOOR SARI	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PENDA NANGE, KECAMATAN BUKIT RAYA, KABUPATEN KATINGAN



11	34/G/2019/PTUN.PLK (DESA / LAIN-LAIN)	23-12-2019	MASTA	1. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TUMBANG KUI; 2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUMBANG KUI
12	35/G/2019/PTUN.PLK (DESA / LAIN-LAIN)	26-12-2019	1. MENTENG; 2. ERI KUSRINIE 3. JOGO RUSTAMAN; 4. RUSLI	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA RANTAU PUKA, KECAMATAN KATINGAN HULU, KABUPATEN KATINGAN
13	36/G/2019/PTUN.PLK (DESA / LAIN-LAIN)	30-12-2019	WANCINO	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PETAK BAHANDANG, KEC. TASIK PAYAWAN, KABUPATEN KATINGAN
14	37/G/2019/PTUN.PLK (DESA / LAIN-LAIN)	31-12-2019	ANOM	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA HAMPALIT, KECAMATAN KATINGAN HILIR, KABUPATEN KATINGAN

**B. PERKARA MASUK TAHUN 2020 : 34 PERKARA**

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL MASUK	PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT/TERMOHON
01	1/G/2020/PTUN.PLK (DESA / LAIN-LAIN)	03-02-2020	JAGORUSTAMAN	- BUPATI KATINGAN; - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RANTAU PUKA, KECAMATAN KATINGAN HULU, KABUPATEN KATINGAN; - PANITIA PILKADES RANTAU PUKA, KECAMATAN KATINGAN, KABUPATEN KATINGAN
02	2/G/2020/PTUN.PLK (DESA / LAIN-LAIN)	06-02-2020	A N O M	- BUPATI KATINGAN; - KETUA PANITIA PILKADES HAMPALIT, KECAMATAN KAHAYAN HILIR, KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019- 2025; - KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HAMPALIT, KECAMATAN KATINGAN HILIR, KABUPATEN KATINGAN;
03	3/G/2020/PTUN.PLK (DESA / LAIN-LAIN)	17-02-2020	MARDI ASIN	- BUPATI KATINGAN; - PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DEHES, KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI, KABUPATEN KATINGAN;
04	4/G/2020/PTUN.PLK (DESA / LAIN-LAIN)	18-02-2020	NOOR SARI	- BUPATI KATINGAN; - KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PENDA NANGE, KECAMATAN BUKIT RAYA, KABUPATEN KATINGAN;
05	5/G/2020/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN )	24-02-2020	MUHAMAD RIAN RAHMADANI	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KAPOLDA KALTENG

06	6/G/2020/PTUN.PLK (DESA / LAIN-LAIN)	24-02-2020	TABUNG	1. BUPATI KATINGAN; 2. KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TUMBANG JALA, KECAMATAN PETAK MALA, KABUPATEN KATINGAN TH. 2019
07	7/G/2020/PTUN.PLK (DESA / LAIN-LAIN)	25-02-2020	MASTA	1. BUPATI KATINGAN; 2. KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TUMBANG KUAI, KECAMATAN KATINGAN HULU, KABUPATEN KATINGAN
08	8/G/2020/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	26-03-2020	SUHANDI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
09	9/G/2020/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	30-03-2020	TOMMY TANUWIDJAJA	KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
10	10/G/2020/PTUN.PLK (DESA/LAIN-LAIN)	09-04-2020	WANCINO	BUPATO KATINGAN
11	<u>1/P/FP/2020/PTUN.PLK</u> <u>(PERMOHONAN)</u>	<u>21-04-2020</u>	<u>Drs. H. NURUL EDY, M.Si</u>	<u>LURAH PALANGKA</u>
12	11/G/2020/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	29-04-2020	SUHANDI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
13	12/G/2020/PTUN.PLK (DESA)	08-06-2020	1. FAUZI KESUMA; 2. ANDI SETYO MARGONO; 3. NYAMIN; 4. EDY SUTIKNO.	- KEPALA DESA KAMPUNG BARU; - CAMAT KATINGAN KUALA; - BUPATI KATINGAN.
14	13/G/2020/PTUN.PLK (DESA)	12-06-2020	SIDUN	KEPALA DESA TURA
15	14/G/2020/PTUN.PLK (DESA)	12-06-2020	MISTORI	KEPALA DESA TURA
16	15/G/2020/PTUN.PLK (DESA)	12-06-2020	HENDRIYONO	KEPALA DESA TURA
17	16/G/2020/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	24-06-2020	TUTIK LASMININGSIH	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
18	17/G/2020/PTUN.PLK (PERIJINAN)	08-07-2020	PT. PADANG MULIA	BUPATI BARITO TIMUR
19	18/G/2020/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	08-07-2020	RITA PERMATA SARI	BUPATI KATINGAN

20	19/G/2020/PTUN.PLK (PERIJINAN)	09-07-2020	PT. PADANG MULIA	BUPATI BARITO TIMUR
21	20/G/2020/PTUN.PLK (PERIJINAN)	09-07-2020	PT. PADANG MULIA	BUPATI BARITO TIMUR
22	21/G/2020/PTUN.PLK (DESA)	20-07-2020	ARAB	KEPALA DESA GERAGU
23	22/G/2020/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	27-07-2020	TUTIK LASMININGSIH	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
24	<u>23/G/KI/2020/PTUN.PLK</u> (Komisi Informasi)	<u>26-08-2020</u>	<u>NORLITA PEBRIANI</u>	<u>KAPOLRES PALANGKA RAYA</u>
25	24/G/2020/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	07-09-2020	1. HIDEN; 2. DOLE; 3. UHING; 4. DEWI; 5. RUSIANA; 6. BAHING; 7. UNYE SAPIA; 8. INYOK; 9. LUHING; 10. RUSLIYA.	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
26	25/G/2020/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	22-09-2020	MENGUMERI BIN HAMBRI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN PALANGKA RAYA KOTA
27	26/G/2020/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	22-09-2020	YUATI ALIAS AYU WULANDARI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
28	27/G/2020/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	08-10-2020	MUNARI	KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) / AGRARIA DAN TATA RUANG (ATR)
29	28/G/2020/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	03-11-2020	LAOSMA PURBA	BUPATI SERUYAN
30	29/G/2020/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	06-11-2020	MEN GUMERI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
31	30/G/2020/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	12-11-2020	DEWAN PENGURUS WILAYAH GERAKAN PEMUDA ASLI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1. WALIKOTA PALANGKA RAYA; 2. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT dan KAWASAN PEMUKIMAN KOTA PALANGKA RAYA; 3. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN dan PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA; 4. CAMAT JEKAN RAYA; 5. LURAH BUKIT TUNGGAL;
32	<u>2/P/FP/2020/PTUN.PLK</u> (PERMOHONAN)	<u>04-12-2020</u>	<u>YISLIA LILIS</u>	<u>KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PULANG PISAU</u>

33	<u>3/P/FP/2020/PTUN.PLK</u> <u>(PERMOHONAN)</u>	<u>04-12-2020</u>	<u>ANDRY KP. YUNI</u>	<u>KEPALA KANTOR</u> <u>PERTANAHAN KABUPATEN</u> <u>PULANG PISAU</u>
34	31/G/2020/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	10-12-2020	JHON KENEDY	1. BUPATI BARITO UTARA; 2. CAMAT LAHEI;

C. PERKARA YANG PUTUS DITAHUN 2020 : 30 PERKARA

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL PUTUS	PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON
01	22/G/2019/PTUN.PLK (PERIJINAN)	09-01-2020	PT. GAUNG ALAM SEMESTA	GUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN KATINGAN
02	24/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	14-01-2020	NOORYANIE DARHAMSIAH	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA; - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (TII.INT)
03	28/G/2019/PTUN.PLK (DESA)	18-02-2020	H. MAHLIANI	1. BUPATI BARITO SELATAN; 2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KALANIS, KECAMATAN DUSUN HILIR, KABUPATEN BARITO SELATAN
04	27/G/2019/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	19-02-2020	Drs. DAGUT, SH.,MT	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
05	26/G/2019/PTUN.PLK (DESA/LAIN-LAIN)	26-02-2020	TATI, S.Pd	1. BUPATI KAPUAS; 2. KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA HURUNG TAMPIN, KECAMATAN PASAK TALA, KABUPATEN KAPUAS; - ASON (TII.INT)
06	29/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	14-04-2020	ERDI	KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
07	31/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	12-05-2020	ARMAN MUIS	KEPALA KANTOR PERTANAHAN PALANGKA RAYA
<u>08</u>	<u>1/P/FP/2020/PTUN.PLK</u> <u>(PERMOHONAN)</u>	<u>20-05-2020</u>	<u>Drs. H. NURUL EDY,</u> <u>M.Si</u>	<u>LURAH PALANGKA</u>

09	3/G/2020/PTUN.PLK (DESA / LAIN-LAIN)	02-06-2020	MARDI ASIN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BUPATI KATINGAN;</li> <li>- PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DEHES, KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI, KABUPATEN KATINGAN;</li> <li>- HERDIYONO (TII.INT)</li> </ul>
10	1/G/2020/PTUN.PLK (DESA / LAIN-LAIN)	04-06-2020	JAGORUSTAMAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BUPATI KATINGAN;</li> <li>- BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RANTAU PUKA, KECAMATAN KATINGAN HULU, KABUPATEN KATINGAN;</li> <li>- PANITIA PILKADES RANTAU PUKA, KECAMATAN KATINGAN, KABUPATEN KATINGAN;</li> <li>- SUNARDIE (TII.INT)</li> </ul>
11	6/G/2020/PTUN.PLK (DESA / LAIN-LAIN)	10-06-2020	TABUNG	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BUPATI KATINGAN;</li> <li>- KETUA PILKADES TUMBANG JALA, KECAMATAN PETAK MALAI, KABUPATEN KATINGAN TH. 2019</li> <li>- WANSON, SE (TII.INT)</li> </ul>
12	2/G/2020/PTUN.PLK (DESA)	11-06-2020	A N O M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BUPATI KATINGAN;</li> <li>- KETUA PANITIA PILKADES HAMPALIT, KECAMATAN KAHAYAN HILIR, KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019-2025;</li> <li>- KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HAMPALIT, KECAMATAN KATINGAN HILIR, KABUPATEN KATINGAN;</li> </ul>
13	5/G/2020/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	18-06-2020	MUHAMAD RIAN RAHMADANI	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KAPOLDA KALTENG
14	30/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	22-06-2020	PT. HARAPAN HIBRIDA KALBAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT;</li> <li>- DINNO ZULFIKAR (TII.INT)</li> </ul>
15	4/G/2020/PTUN.PLK (DESA)	24-06-2020	NOOR SARI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BUPATI KATINGAN;</li> <li>- KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PENDA NANGE, KECAMATAN BUKIT RAYA, KABUPATEN KATINGAN;</li> <li>- NETIE (TII.INT)</li> </ul>
16	10/G/2020/PTUN.PLK (DESA)	16-07-2020	WANCINO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BUPATI KATINGAN ;</li> <li>2. EMAN (TII.INT)</li> </ol>



17	9/G/2020/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	21-07-2020	TOMMY TANUWIDJAJA	- KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR; - TRI DARTAHENA, SH., M.Kn (TII.INT)
18	32/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	28-07-2020	1. ERWIN BARUS; 2. SULAEMAN; 3. KENJI JOSH FRINCEN LEE; 4. HORMAN	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR; - PERTAMINA (TII.INT)
19	11/G/2020/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	01-09-2020	SUHANDI	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT; - MUHAMMAD JAINURI (TII.INT).
20	21/G/2020/PTUN.PLK (DESA)	03-09-2020	ARAB	KEPALA DESA GERAGU
21	13/G/2020/PTUN.PLK (PERANGKAT DESA)	23-09-2020	SINDUN	KEPALA DESA TURA
22	14/G/2020/PTUN.PLK (PERANGKAT DESA)	23-09-2020	MISTORI	KEPALA DESA TURA
23	15/G/2020/PTUN.PLK (PERANGKAT DESA)	23-09-2020	HENDRIYONO	KEPALA DESA TURA
24	12/G/2020/PTUN.PLK (PERANGKAT DESA)	24-09-2020	1. FAUZI KESUMA; 2. ANDI SETYO MARGONO; 3. NYAMIN;	- KEPALA DESA KAMPUNG BARU; - MISRIYADI (TII INT I); - NONOK AGUS HARIANTO (TII INT II); - ABDUL ROHIM (TII INT III);
25	18/G/2020/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	22-10-2020	RITA PERMATA SARI	BUPATI KATINGAN
26	<u>23/G/KI/2020/PTUN.PLK</u> <u>(KOMISI INFORMASI)</u>	<u>22-10-2020</u>	<u>NORLITA PEBRIANI</u>	<u>KAPOLRES PALANGKA</u> <u>RAYA</u>
27	17/G/2020/PTUN.PLK (PERIZINAN)	11-11-2020	PT. PADANG MULIA	BUPATI BARITO TIMUR;
28	19/G/2020/PTUN.PLK (PERIZINAN)	11-11-2020	PT. PADANG MULIA	- BUPATI BARITO TIMUR; - PT. ANUGERAH KREASI KARYA (TII.INT)



29	20/G/2020/PTUN.PLK (PERIZINAN)	26-11-2020	PT. PADANG MULIA	- BUPATI BARITO TIMUR; - PT. ANUGERAH KREASI KARYA (TII.INT)
30	22/G/2020/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	08-12-2020	TUTIK LASMININGSIH	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA

**D. PERKARA YANG DICABUT DI TAHUN 2020 : 14 PERKARA**

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL DICABUT	PENGGUGAT PEMOHON	TERGUGAT TERMOHON
01	33./G/2019/PTUN.PLK (DESA / LAIN-LAIN)	13-01-2020	NOOR SARI	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PENDA NANGE, KECAMATAN BUKIT RAYA, KABUPATEN KATINGAN
02	34./G/2019/PTUN.PLK (DESA / LAIN-LAIN)	14-01-2020	MASTA	1. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TUMBANG KUI; 2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUMBANG KUI
03	37/G/2019/PTUN.PLK (DESA / LAIN-LAIN)	14-01-2020	ANOM	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA HAMPALIT, KECAMATAN KATINGAN HILIR, KABUPATEN KATINGAN
04	35./G/2019/PTUN.PLK (DESA / LAIN-LAIN)	16-01-2020	1. MENTENG; 2. ERI KUSRINIE; 3. JOGO RUSTAMAN; 4. RUSLI;	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA RANTAU PUKA, KECAMATAN KATINGAN HULU, KABUPATEN KATINGAN
05	36/G/2019/PTUN.PLK (DESA / LAIN-LAIN)	28-01-2020	WANCINO	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PETAK BAHANDANG, KECAMATAN TASIK PAYAWAN, KABUPATEN KATINGAN
06	7/G/2020/PTUN.PLK (DESA / LAIN-LAIN)	17-03-2020	MASTA	1. BUPATI KATINGAN; 2. KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TUMBANG KUI, KECAMATAN Katingan Hulu, KABUPATEN KATINGAN
07	8/G/2020/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	27-03-2020	SUHARDI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
08	16/G/2020/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	24-06-2020	TUTIK LASMININGSIH	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
09	25/G/2020/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	06-10-2020	MENGUMERI BIN HAMBRI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
10	26/G/2020/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	06-10-2020	YUATI ALIAS AYU WULANDARI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA

11	<u>2/P/FP/2020/PTUN.PLK (PERMOHONAN)</u>	<u>07-12-2020</u>	<u>YISLIA LILIS</u>	<u>KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PULANG PISAU</u>
12	<u>3/P/FP/2020/PTUN.PLK (PERMOHONAN)</u>	<u>07-12-2020</u>	<u>ANDRY KP YUNI</u>	<u>KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PULANG PISAU</u>
13	29/G/2020/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	08-12-2020	MEN GUMERI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
14	30/G/2020/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	08-12-2020	DEWAN PENGURUS WILAYAH GERAKAN PEMUDA ASLI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. WALIKOTA PALANGKA RAYA;</li> <li>2. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT dan KAWASAN PEMUKIMAN KOTA PALANGKA RAYA;</li> <li>3. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN dan PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA;</li> <li>4. CAMAT JEKAN RAYA;</li> <li>5. LURAH BUKIT TUNGGAL;</li> </ol>

**E. PERKARA BANDING YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2020 : 24 PERKARA**

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PENGAJUAN BANDING	PEMBANDING	TERBANDING
01	22/G/2019/PTUN.PLK (PERIJINAN) PT. GAUNG ALAM SEMESTA <b>MELAWAN</b> GUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN KATINGAN	23-01-2020	PT. GAUNG ALAM SEMESTA	GUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN KATINGAN
02	24/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	23-01-2020	NOORYANIE DARHAMSIAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA;</li> <li>- PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (TII. INT)</li> </ul>
03	27/G/2019/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	26-02-2020	Drs. DAGUT, SH.,MT	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
04	26/G/2019/PTUN.PLK (DESA/LAIN-LAIN)	10-03-2020	TATI, S.Pd	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BUPATI KAPUAS;</li> <li>2. KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA HURUNG TAMPIN, KECAMATAN PASAK TALA, KABUPATEN KAPUAS</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ASON (TII.INT)</li> </ul>
	29/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	21-04-2020	ERDI	KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN

05				NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
06	31/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	20-05-2020	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	ARMAN MUIS
07	3/G/2020/PTUN.PLK (DESA)	04-06-2020	MARDI ASIN	- BUPATI KATINGAN; - PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DEHES, KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI, KABUPATEN KATINGAN; - HERDIYONO (TII.INT)
08	1/G/2020/PTUN.PLK (DESA)	12-06-2020	SUNARDIE (TII.INT)	JAGORUSTAMAN
09	6/G/2020/PTUN.PLK (DESA)	12-06-2020	WANSON (TII.INT)	TABUNG
10	5/G/2020/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	29-06-2020	MUHAMAD RYAN RAHMADANI	KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
11	4/G/2020/PTUN.PLK (DESA)	03-07-2020	- BUPATI KATINGAN; - NETIE (TII.INT)	NOOR SARI
12	30/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	06-07-2020	DINNO ZULFIKAR WALUYAN (TII.INT)	PT. HARAPAN HIBRIDA KALBAR
13	10/G/2020/PTUN.PLK (DESA)	27-07-2020	WANCINO	1. BUPATI KATINGAN ; 2. EMAN (TII.INT)
14	9/G/2020/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	28-07-2020	TOMMY TANUWIDJAJA	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR; - TRI DARTAHENA, SH., M.Kn (TII.INT)
15	32/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	11-08-2020	1. ERWIN BARUS; 2. SULAEMAN; 3. KENJI JOSH FRINCEN LEE; 4. HORMAN;	- KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH - PERTAMINA (TII.INT)
16	11/G/2020/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	10-09-2020	MUHAMMAD JAINURI (TII.INT)	SUHANDI
17	13/G/2020/PTUN.PLK (PERANGKAT DESA)	28-09-2020	KEPALA DESA TURA	SINDUN
18	14/G/2020/PTUN.PLK (PERANGKAT DESA)	28-09-2020	KEPALA DESA TURA	MISTORI
19	15/G/2020/PTUN.PLK (PERANGKAT DESA)	28-09-2020	KEPALA DESA TURA	HENDRIYONO
20	12/G/2020/PTUN.PLK (PERANGKAT DESA)	05-10-2020	1. FAUZI KESUMA; 2. ANDI SETYO MARGONO;	1. KEPALA DESA KAMPUNG BARU; 2. a. MISRIYADI (TII.INT I); 2. b. NONOK AGUS HARIANTO (TII.INT II); 2. c. ABDUL ROHIM (TII.INT III);
21	18/G/2020/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	05-11-2020	BUPATI KATINGAN	RITA PERMATA SARI, S.Tr.Keb
22	17/G/2020/PTUN.PLK (PERIZINAN)	25-11-2020	PT. PADANG MULIA	BUPATI BARITO TIMUR
23	19/G/2020/PTUN.PLK	25-11-2020	PT. PADANG MULIA	- BUPATI BARITO TIMUR;